

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SENGAYAM KECAMATAN PAMUKAN BARAT

*** Sandri Alfandi¹⁾, Asmu'i²⁾**

- 1) Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
- 2) Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi kebijakan penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa Sengayam kecamatan Pamukan Barat dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara kepada setiap informan yang dianggap berpotensi memberikan keterangan mengenai pemberdayaan masyarakat desa di Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat. Hasil penelitian dari Implementasi kebijakan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan sudah bisa dikatakan maksimal namun belum bisa dikatakan efektif karena apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa walaupun sudah mampu menghadirkan lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang mana dapat membantu perekonomian masyarakat yang secara langsung terlibat pada program pemberdayaan bidang pertanian dan peternakan dengan program PKTD Jagung dan Budidaya Ikan Nila tetapi program tersebut tidak bisa menghadirkan keberdayaan karena bersifat periodik yang mana hanya bisa membantu masyarakat diwaktu pelaksanaannya saja dari awal masa tanam sampai masa panen setelahnya masyarakat kembali tidak mempunyai pekerjaan. Dalam proses perencanaan program pemberdayaan sudah terlihat baik dengan melibatkan setiap stakeholder untuk terlibat dalam penyusunan program-program kerja pada musyawarah dengan komunikasi yang terbuka. Didalam proses pelaksanaan pun sudah baik karena sesuai apa yang telah direncanakan. Kemudian dalam pelaksanaan evaluasi, pemerintah desa selalu melakukan komunikasi kepada para masyarakat yang ikut terlibat baik secara langsung ditempat ataupun pada saat musyawarah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Pemerintah Desa dapat melibatkan lebih banyak lagi masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan yang sesuai dengan minat dan potensi masyarakat. Selain itu, pemerintah desa perlu memperhatikan alokasi dana untuk masing-masing bidang, agar kiranya dana untuk bidang pemberdayaan masyarakat dapat meningkat dan tidak terfokus disatu bidang yang menjadi potensi. Pemerintah desa juga perlu menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana desa dan hasil dari program pemberdayaan kepada masyarakat agar dapat diketahui secara luas dan dapat diawasi secara bersama.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Implementasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan konsep Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah desa didalam negara kesatuan republik Indonesia. Maka dari itu terbitlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang memiliki tujuan untuk menciptakan desa yang mandiri dan dapat memberdayakan masyarakat desa secara maksimal berdasarkan potensi yang dimiliki desa bersangkutan (Makmur, 2008), dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar dan Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten atau kota diperhitungkan dalam perhitungan alokasi (Rama & Setiawan, 2021).

Mengingat masih terdapatnya permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan dan masih memerlukan perhatian, yaitu kesenjangan pembangunan antar daerah, keunggulan kota yang cukup besar, permasalahan kemiskinan, hubungan kota-desa atau hubungan yang kurang sinergis, dan daerah tertinggal. Diskriminasi terhadap desa-desa di berbagai wilayah pembangunan merupakan konsekuensi dari tertinggalnya wilayah pedesaan (Setiawan, 2023). Berdasarkan Perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) per Mei 2024 jumlah desa sangat tertinggal di Indonesia berjumlah 14 desa atau 0,74%, desa tertinggal di Indonesia berjumlah 67 desa atau 3.53%, desa berkembang di Indonesia berjumlah 562 atau 29,64%, desa maju berjumlah 582 atau 30,70%, dan desa mandiri berjumlah 671 atau 35,39%.

Pada tahun 2024 salah satu Kabupaten di Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Kotabaru mendapatkan penambahan dana desa sekitar 1,4 persen

dari pagu tahun lalu sebesar Rp161,62 Miliar dengan jumlah desa yang sama. Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Kotabaru yang mendapatkan alokasi penggunaan dana desa sebesar Rp. 1.101.714 pada tahun 2024, penggunaan dana desa untuk memberdayakan masyarakat desa. Desa Sengayam juga merupakan salah satu wilayah paling depan yang menjadi pintu masuk dari Provinsi lain ke Provinsi Kalimantan Selatan maka sudah seharusnya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa harus lebih baik yaitu dengan penggunaan dana desa untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Luas wilayah Desa Sengayam sendiri adalah 286,53 Km. Terdiri dari 3 Dusun dengan 14 RT. Sedangkan Jumlah penduduk Desa Sengayam pada Tahun 2024 berdasarkan data administrasi kependudukan pada tahun 2024, jumlah penduduk desa Sengayam adalah 2445 jiwa yang terdiri dari 653 KK, dengan rincian 1236 laki-laki dan 1209 perempuan.

Dilihat dari aspek kesejahteraan yang tercermin dari banyaknya penduduk tidak mampu menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan masyarakat di Desa Sengayam ini, dimana dengan jumlah penduduk sebanyak 2455 jiwa dan yang tidak mampu tahun 2024 sebanyak 391 orang dari 74 KK. Dengan kondisi demikian maka menjadikan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan untuk dapat menurunkan jumlah masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah (Almond & Powell, 1966).

Pemberdayaan Desa Sengayam paling banyak mengeluarkan dana desa yaitu pada bidang pertanian dengan ditetapkannya program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Tanam Jagung yang terdiri kurang lebih 40 anggota dari 5 kelompok tani, yang mana setiap kelompok mendapatkan bibit jagung. Diharapkan dengan ini dapat membantu warga Desa Sengayam agar bisa dikembangkan supaya tercapai hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Potensi pertanian dengan ketersediaan lahan untuk pertanian masih luas dan lapangan pekerjaan pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang dominan di Desa Sengayam. Hal ini menunjukkan sektor pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi

utama penduduk, hal ini disebabkan sektor pertanian atau sektor primer tidak membutuhkan spesifikasi skill yang tinggi untuk dapat bekerja di sektor tersebut. Selain pemberdayaan pertanian dengan alokasi dana desa, terdapat permasalahan pemberdayaan di bidang peternakan yang mana tidak sepenuhnya di pegang kendali oleh aparat desa dan masyarakat tetapi bekerja sama dengan pihak swasta. Dengan hal tersebut, penggunaan dana desa dalam bidang peternakan perlu diperhatikan dan mampu menghasilkan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat meningkatkan derajat penduduk yang ada di Desa Sengayam.

Pemberdayaan masyarakat merupakan harapan untuk dapat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dan sejahtera dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran. Selain itu juga dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan lebih baik dengan mengembangkan kebijakan, program, kegiatan, dan bantuan yang sejalan dengan permasalahan dan kebutuhan utama masyarakat Desa. Berkaitan dengan implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Sengayam berdasarkan penjelasan di atas memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan peternakan yang mampu memberdayakan masyarakat desanya, namun belum sepenuhnya di kelola oleh masyarakat desa. Selain karena alasan Desa Sengayam yang mendapatkan kucuran alokasi dana desa yang besar dibandingkan desa-desa lain yang ada di kecamatan Pamukan Barat, Desa Sengayam juga merupakan salah satu wilayah paling depan yang menjadi pintu masuk dari Provinsi lain ke Provinsi Kalimantan Selatan maka sudah seharusnya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa harus lebih baik yaitu dengan cara pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta penelitian ini adalah penelitian pertama yang dilaksanakan di lokasi ini maka dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi ini. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi kebijakan penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Seperangkat gagasan dan sila yang dikenal sebagai kebijakan berfungsi sebagai aturan dan landasan bagi rencana kerja, gaya kepemimpinan, dan pola perilaku. Frasa tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan orang, pemerintah, dan perusahaan serta organisasi di sektor bisnis. Kebijakan publik juga merupakan output dari proses penyelenggaraan pemerintahan, dimana output ini bertujuan untuk mengatur serta mengatasi segala problema atau gejala-gejala yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, substansi dan proses kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek pemerintahan termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah itu sendiri. Menurut Edward dan Sharkansy kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, mencakup : pelaksanaan niat, dan peraturan. Menurut Rs. Parker Kebijakan Publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu obyek atau tanggapan terhadap krisis (Howlett & Ramesh, 2003).

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Peneliti lebih terfokus pada konsep implementasi kebijakan karena berhubungan penelitian peneliti yaitu terkait Implementasi kebijakan penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa Sengayam kecamatan Pamukan Barat.

Implementasi mengacu pada serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membawa suatu program membuahkan hasil. Langkah penting dalam kerangka kebijakan adalah implementasi kebijakan. Agar suatu kebijakan pemerintah dapat memberikan output dan outcome yang diharapkan, tahap ini memastikan apakah kebijakan tersebut benar-benar relevan di lapangan. Kebijakan publik harus dilaksanakan untuk mencapai output dan outcome yang dijanjikan, sebagaimana dikemukakan oleh Udoji yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah signifikan dan bahkan layak dilakukan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanya akan menjadi catatan elite (Budi Winarno, 2008). Jauh lebih penting daripada

merumuskan kebijakan. Jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak dipraktikkan, maka cita-cita atau ide-ide yang bertujuan baik akan tetap disimpan dengan hati-hati dalam arsip.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu keputusan dasar politik yang diambil oleh individu/kelompok baik di sektor publik maupun swasta yang dapat berbentuk undang-undang atau perintah eksekutif atau baik oleh individu atau kelompok di sektor publik maupun swasta, dimulai dengan penyusunan tujuan dan sasaran serta penyisihan dana untuk menciptakan fasilitas yang dapat berdampak pada apa pun.

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi terdapat Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan. Menurut Van Metter dan Van Horn dalam menyatakan bahwa ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecendrungan, Komunikasi antar Organisasi serta Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Dana Desa (Thomas R. Dy, 2005). Dana Desa adalah dana yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi Desa. Mereka digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat..

Sumber pendapatan desa antara lain Pendapatan Asli Desa (PAD), alokasi APBN, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan, serta Dana Desa itu sendiri. Belanja

pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lainlain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2014 bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.³⁰ Berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 60 Tahun 2014, dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Tujuan Dana Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Konsep Pemberdayaan baik untuk diterapkan, dimana Pengertian pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan berasal dari kata “*daya*” yang mendapat awalan bermenjadi kata”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan (Setiawan, 2023).

Pemberdayaan secara konseptual berasal dari kata *power* (baik pemberdayaan atau *power*). Pemberdayaan adalah kapasitas individu. Khususnya kelompok lemah dan rentan agar mereka mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk: (a) memenuhi kebutuhan dasar mereka agar bisa bebas, artinya mereka tidak hanya bebas berpendapat tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan penderitaan. (b) mencari sumber-sumber produktif untuk meningkatkan pendapatan mereka dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan; dan (c) mengambil bagian dalam proses dan keputusan terkait pembangunan yang berdampak pada pembangunan.

Proses pembelajaran didalam upaya untuk pemberdayaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang mengerahkan atau menggunakan sumber daya yang terbatas secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah upaya metadis yang menentukan pengaturan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau institusi. Proses kegiatan pelaksanaan dimulai dari pelaksanaan pertama dan berlanjut hingga pelaksanaan akhir. Sebelum kegiatan dilaksanakan, persiapan merupakan bagian pelaksanaan yang pertama. Pelaksanaan akhir, yang meliputi hasil kegiatan dan pelaporan, menandai selesainya pelaksanaan kegiatan. Implementasi merupakan komponen kegiatan teknis yang dilaksanakan (Makmur, 2008). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa baik peserta acara pemberdayaan memahami kegiatan yang diadakan, baik secara lisan maupun pengalaman langsung. Di akhir kegiatan, pemberi kerja atau instruktur melakukan evaluasi. Indikator Keberdayaan Kompetensi populer, kapasitas sosial politik, dan kompetensi partisipatif merupakan tiga komponen pemberdayaan (Smith, 1993; Tayler & Zilberman, 2024).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti tentang Impelementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan di Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian bisa berupa perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain (Sugiyono, 2017). Tipe penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain (Sugiyono, 2017). Jenis data pada penelitian yang pertama adalah jenis data primer, yang mana pengambilan data dapat dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada informan dengan cara melakukan wawancara secara mendalam. Kemudian untuk jenis data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data dari

dokumentasi dan observasi yang dilakukan. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data didalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu (Ansori, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Dana Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah sosial, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Tujuan yang ingin di capai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

1. Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sengayam

Jika tujuan dan ruang lingkup kebijakan selaras dengan budaya pelaksana dan pengawas kebijakan, maka tingkat keberhasilan penerapan kebijakan dapat dinilai. Dalam hal ini, pemerintah harus memimpin dan menasihati masyarakat hingga masyarakat dinilai mampu, sebagaimana diketahui bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat miskin membuat mereka sulit mendapatkan bimbingan dan arahan. Oleh karena itu, pengawasan berkelanjutan diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Masyarakat harus siap menerima program pemerintah agar berhasil. Oleh karena itu, masyarakat harus dilibatkan sejak awal tahap desain, implementasi, dan penilaian program agar masyarakat berdaya dengan program

pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat menciptakan peluang sebesar-besarnya bagi berbagai pihak untuk ikut berkontribusi. dan juga mendorong untuk berperan aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

2. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sengayam

Pelaksanaan pemberdayaan merupakan bagian dari Proses pemberian atau pengalihan sejumlah kekuasaan, wewenang, atau kemampuan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan individu merupakan fokus dari proses pemberdayaan. Pemerintah desa telah menyiapkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan dibidang pertanian dan peternakan, dengan menganggarkan dana yang cukup besar diangka 200 juta, sehingga ini diharapkan mampu memberikan dampak kesejahteraan untuk masyarakat yang ikut terlibat secara langsung pada program ini.

3. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Sengayam

Evaluasi pemberdayaan, yang berfungsi sebagai ukuran kemampuan, merupakan langkah terakhir dalam proses tersebut. orang-orang yang ikut terlibat didalam pemberdayaan khususnya masyarakat yang mengikuti program-program tersebut. Pada perencanaan pemberdayaan sampai dengan tahap pelaksanaan kegiatan evaluasi dilakukan supaya perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian dan peternakan dilakukan baik secara lisan maupun melalui pengalaman langsung, untuk memastikan tingkat pemberdayaan pemahaman peserta terhadap kegiatan yang diselenggarakan.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Desa Sengayam

Hal-hal yang mempunyai pengaruh besar terhadap setiap tindakan yang dilakukan disebut dengan faktor pendukung. Unsur yang mendorong tindakan terkait pemberdayaan di sektor pertanian dan peternakan masyarakat di desa Sengayam adalah motivasi yang berada dari dalam diri sendiri dan motivasi yang diberikan dari keluarga. menunjukkan bahwa sumber daya baik manusia maupun alam serta motivasi merupakan pendorong utama inisiatif pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan peternakan. yang sangat mendukung pemberdayaan masyarakat

melalui program-program yang telah dilaksanakan. Faktor penghambat dari program-program pemberdayaan dibidang pertanian dan peternakan di desa sengayam adalah salah satunya karena faktor dari sikap masyarakat yang merasa lebih paham dengan cara melaksanakan program-program ini, sehingga mereka tidak antusias ketika diadakan pelatihan ataupun pembekalan. faktor utama penghambat pemberdayaan dibidang pertanian adalah adanya masyarakat yang merasa mereka lebih mengerti sehingga membuat mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah desa atau pihak terkait, selain itu karena faktor ketidakpuasan dengan pengelolaan hasil akhir yang tidak terbuka sehingga membuat masyarakat tidak terlalu mendukung sepenuhnya program-program pemberdayaan ini dilaksanakan terus menerus.

5. Standar dan Sasaran Kebijakan Standar dan sasaran kebijakan, dalam sebuah pelaksanaan kebijakan sangat membutuhkan perencanaan, dimana implementor yang bertugas harus memahami suatu ukuran dari pelaksanaan dan juga tujuan dari pelaksanaan agar dapat bejalan sesuai dengan perencanaan dan ketika terjadi evaluasi tidak banyak dilakukan perubahan.

Temuan studi ini menunjukkan betapa bermanfaatnya ruang lingkup dan tujuan kebijakan tersebut, karena dapat meningkatkan kesejahteraan dan prospek lapangan kerja bagi masyarakat miskin di desa tersebut melalui inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi. Meningkatkan keterlibatan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari inisiatif pemberdayaan ini, khususnya di kalangan masyarakat kurang mampu baik yang bersifat individu maupun anggota kelompok. Pemerintah desa berencana untuk mengikutsertakan masyarakat terkait dalam program pemberdayaan di bidang pertanian dan peternakan sejak awal pengembangan kebijakan hingga saat pelaksanaan kebijakan. Ketika pemerintahan desa menjalankan tugasnya, terlihat betapa pentingnya hal tersebut dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. diatur dengan Peraturan Bupati Kotabaru Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa; UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan Permendesa Pdtt 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Dengan kata lain, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah dari, untuk, dan dari masyarakat; Artinya, upaya menjadikan manusia sebagai sumber, pelaku, dan individu yang memperoleh manfaat dari proses tersebut. Terkait dengan pelaksanaannya merupakan salah satu tujuan kebijakan tersebut. program pemberdayaan dibidang pertanian dan peternakan yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang cukup antusias dengan menghadirkannya lapangan pekerjaan dan memberikan dampak positif juga untuk desa dengan menghasilkan pendapatan. Maka apakah implementasi kebijakan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan telah mencapai sasaran dan tujuan dapat dikatakan bahwa sasaran dan tujuan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan sudah tercapai karena masyarakat yang terkait secara langsung dengan program PKTD Jagung dan Budidaya Ikan nila mendapatkan dampak positif dengan memiliki pekerjaan.

Sumberdaya Sumber daya adalah indikator berikutnya yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan. Sumber daya manusia dan sumber daya keuangan merupakan dua indikator dalam penelitian ini yang mempunyai dampak terhadap sumber daya. Pertama, sumber daya manusia Desa Sengayam telah berkontribusi dalam inisiatif pemberdayaan di bidang pertanian dan peternakan; salah satu cara masyarakat mendapatkan manfaat dari dukungan ini adalah melalui pelatihan atau penyuluhan pertanian dan pelatihan budidaya ikan. Pelatihan ini melibatkan masyarakat dan juga pemerintah desa itu sendiri untuk dapat menunjang pelaksanaan fungsi dan tugasnya, bentuk dukungan seperti ini sangat menunjang/membantu agar dapat menjalankan program pemberdayaan secara maksimal agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Walaupun masyarakat adalah sebagian besar petani, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka juga perlu mendapatkan pelatihan ataupun arahan agar dapat memaksimalkan potensi dan menghindari kegagalan. Dalam implementasi kebijakan selain sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran juga penting karena menjadi faktor utama dalam menjalankan program ataupun kegiatan yang skalanya cukup besar. Salah satu tujuan utama pemberdayaan di bidang pertanian dan peternakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja kepada masyarakat miskin dipedesaan, dengan anggaran yang sudah di anggarkan pemerintah desa yang

angkanya cukup signifikan yaitu 18% dari total anggaran APBDes desa Sengayam tahun 2023.

Hubungan Antar Organisasi Hubungan dalam perusahaan, atau lebih tepatnya, komunikasi, merupakan variabel yang kurang penting dalam pengambilan kebijakan karena memungkinkan perencanaan dan implementasi yang maksimal sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah. Karena perencanaan yang matang sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan program pemberdayaan masyarakat Desa Sengayam sudah berjalan cukup lama, baik masyarakat maupun pemerintah desa mempunyai banyak pengalaman bekerja sama dan berkomunikasi sesuai dengan tanggung jawab utama dan tanggung jawab masing-masing.. Komunikasi juga dilakukan saat musyawarah desa dan diadakan juga pelatihan agar perintah dapat dilakukan dengan jelas, selain musyawarah saat perencanaan komunikasi atau koordinasi juga berlangsung sata pelaksanaan yang mana agar terjadi keharmonisan dan kesesuaian apa yang diperintahkan dengan apa yang dikerjakan, begitu pula dengan evaluasi disini komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat harus benar-benar terjalin baik agar tidak berdampak buruk dengan adanya miss komunikasi atau kesalahpahaman dalam menanggapi evaluasi dari berbagai pihak dan juga untuk mencari tau jika ada permasalahan yang dihadapi ketika proses pelaksanaan sedang berlangsung.

Karakteristik Agen Pelaksana Kemampuan suatu kebijakan untuk diimplementasikan akan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian dan kualitas kebijakan tersebut. dengan para petugasnya baik dari pemerintah desa maupun masyarakat untuk dapat menjalankan suatu program yang dimulai dari tahap perencanaan kemudian ketahap pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan dari proses pemberdayaan masyarakat desa, pada beberapa kesempatan para pelaksana kebijakan dituntut untuk disiplin dalam menjalankan kegiatannya. Dalam hal ini agen pelaksana memiliki karakteristik yang berbeda karena dilatar belakangi faktor pendidikan dan kepribadian, namun masyarakat yang menjadi pelaksana telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga memberikan dampak positif disetiap program yang dikerjakan.

Disposisi Implementor / Sikap Para Pelaksana Agar dapat menerapkan kebijakan dengan benar, para pelaksana harus memahami isinya agar dapat memahami inti kebijakan tersebut. yaitu program yang akan dilaksanakan dengan memperhitungkan dampak positif dan negatifnya agar para pelaksana kebijakan dapat berhasil dan tanpa mengalami kendala. Masyarakat pun disini harus diberpartisipasi baik yang secara langsung ikut dalam program pemberdayaan ataupun yang tidak sehingga terjadi kontrol dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam program PKTD Jagung dan Budidaya Ikan Nila yang ada di desa Sengayam ini menggunakan pendekatan bottom up, dimana kebijakan program ini ditujukan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dilibatkan dari awal hingga akhir. dari tahap perencanaan tahap pelaksanaan dan pada tahap evaluasi yang bisa diikuti semua lapisan masyarakat baik yang ikut pada program pemberdayaan ataupun tidak.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Sejauh mana pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan suatu kebijakan merupakan faktor terakhir yang harus diperhitungkan ketika mengevaluasi implementasinya. Lingkungan sosial politik di Desa Sengayam telah memudahkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, terbukti dengan adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program. PKTD Jagung dan Budidaya Ikan Nila. Namun dalam segi ekonomi masih bisa dikatakan belum terlalu maksimal karena keterbatasan anggaran sehingga tidak dapat mengcover semua masyarakat miskin yang ada di desa Sengayam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan sudah bisa dikatakan baik yang telah dilakukan oleh pemerintah desa karena mampu menghadirkan lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang mana dapat membantu perekonomian masyarakat yang secara langsung terlibat pada program pemberdayaan bidang pertanian dan peternakan dengan program PKTD Jagung dan Budidaya Ikan Nila. Namun tidak menutup kemungkinan masih menyisakan beberapa catatan yang perlu dibenahi kedepannya seperti hasil dari penjualan panen jagung yang tidak terbuka kepada

masyarakat umum dan diharapkan partisipasi masyarakat bisa lebih maksimal kedepannya dari kelompok masyarakat yang tidak mengikuti program pemberdayaan. Dalam proses perencanaan program pemberdayaan sudah terlihat baik dengan melibatkan setiap stakeholder untuk terlibat dalam penyusunan program-program kerja pada musyawarah dengan komunikasi yang terbuka, selain itu paa tahapan perencanaanpun sudah baik dengan melakukan pelatihan atau pembekalan kepada msasyarakat yang ikut terlibat secara langsung pada program pemberdayaan. Didalam proses pelaksanaan pun sudah baik karena sesuai apa yang telah direncanakan dengan kegiatan yang dilakukan secara berjenjang dengan pengawasan yang baik oleh pemerintah desa dan juga dengan penggunaan anggaran yang telah disepakai bersama pada tahap perencanaan, namun terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam program pemberdayaan khususnya program PKTD Jagung yang hasil penjualan tidak terbuka kepada masyarakat khususnya para pekerja yang ikut terlibat diprogram tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan evaluasi, pemerintah desa selalu melakukan komunikasi kepada para masyarakat yang ikut terlibat baik secara langsung ditempat ataupun pada saat musyawarah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik evaluasi secara langsung dan evaluasi menyeluruh untuk menilai apakah kegiatan ini sudah baik dan efektif untk menghadirkan kesejahteraan pada masyarakat desa Sengayam.

REFERENSI

- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). *Comparative politics: a development approach an analytic study*. Boston Little Brown.
- Ansori, M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2*. Airlangga University Press.
- Budi Winarno. (2008). *Kebijakan Publik*. Gramedia.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems. (2nd edn.)*. Oxford University Press, Oxford.
- Makmur, S. (2008). *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Rajawali Press.
- Rama, B., & Setiawan, F. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara, 5(1), 14.
<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i1.1662>

Setiawan, F. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Tumbang Bantian. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7(1), 48–58.
<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4157>

Smith, M. J. (1993). *Pressure Power & Policy: State Autonomy and Policy Networks in Britain and the United States*. . Harvester Wheatsheaf.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Tayler, W. J., & Zilberman, R. (2024). Unconventional policies in state-dependent liquidity traps. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 168, 104956.
<https://doi.org/10.1016/j.jedc.2024.104956>

Thomas R. Dy. (2005). *Understanding Public Policy*. Pearson Education Inc.